DAMPAK PANDEMI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA SIMPANG PROPAU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Milda Ummi Khusmiyati¹⁾, Riani Eka Putri²⁾, Esya Sevia Putri³⁾ Rizka Nurhaliza⁴⁾
1) 2) 3) 4) Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

ABSTRAK

Para pelaku usaha sektor informal yakni Pedagang Kaki Lima (PKL) turut merasakan dampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Terlebih di tengah situasi darurat yang belum mereda saat ini, pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB atau PPKM yang ditujukan untuk menekan penyebaran virus dengan membatasi pergerakan masyarakat membuat kondisi perekonomian mereka semakin mengalami keterbelakangan. Oleh karena itu, mereka perlu strategi untuk mempertahankan usaha mereka di tengah pandemi saat ini agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pedagang kaki lima (PKL) di desa Simpang Propau kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara dalam mempertahankan usahanya di tengah kondisi pandemi yang sudah berjalan lebih dari satu tahun ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Wawancara dan observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebanyak tiga orang informan dalam penelitian ini diwawancarai untuk mendapatkan beberapa keterangan guna kepentingan penelitian. Hasil dari penelitian ini akan mengungkapkan permasalahan berdasarkan sudut pandang mereka.

Kata kunci: PKL, PSBB, Strategi Bertahan, Keberlanjutan Usaha

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang kemunculannya dimulai sejak Maret 2019 lalu telah menimbulkan berbagai dampak dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak ekonomi merupakan yang terparah karena efek yang ditimbulkan sampai melemahkan perekonomian negara. Pemerintah Indonesia lebih memilih menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dibanding menerapkan *lockdown* untuk menekan jumlah kasus penularan COVID-19 agar tidak bertambah. Langkah tersebut diambil bukan hanya untuk menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga untuk menyelamatkan kembali perekonomian agar cepat pulih dan stabil. Periode awal penerapan kebijakan PSBB yang dimulai pada awal April 2020 lalu selama 14 hari yang dilaksanakan di 4 provinsi serta 72 kabupaten dan kota. Di beberapa daerah langkah tersebut telah berhasil menekan turun angka penularan COVID-19 meskipun tidak secara drastis.

Masa-masa saat PSBB berlangsung menyebabkan adanya peraturan untuk bekerja dari rumah, sehingga aktivitas masyarakat terhambat karena pergerakan mereka dibatasi. Hal tersebut berimbas pada banyaknya karyawan yang dirumahkan dan bahkan sampai berujung pada adanya pemutusan hubungan kerja, sehingga dampak yang ditimbulkan dari PSBB ini justru malah membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Namun bukan hanya kelompok masyarakat yang bekerja di kantor atau pabrik yang mengalami kerugian dari

PSBB ini, tetapi juga kelompok masyarakat yang menjalankan usaha di sektor informal merasakan dampak terhadap menurunnya pendapatan bahkan beberapa ada yang sampai menutup usahanya. Mereka yang bergantung hidup pada pendapatan harian dan dengan kepemilikan modal yang sangat minim akan kesulitan untuk bertahan di situasi sekarang sehingga mereka semakin mengalami keterbelakangan.

Keterbatasan pendapatan di tengah situasi pandemi sekarang ini menyebabkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seperti pedagang kaki lima mengalami kesulitan finansial untuk bertahan hidup. Akibat PSBB mereka kehilangan akses untuk mendapat konsumen sehingga permintaan menjadi berkurang. Belum lagi mereka harus pintar berhemat dalam mengatur keuangan dari pemasukan yang terbatas sehingga kebutuhan hidup tetap terpenuhi dan modal usaha tetap tersedia. Selain itu adanya bencana ini mengharuskan mereka memikirkan strategi paling efektif yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya, salah satunya dengan membuka pemesanan secara *online*. Hal itu karena saat pandemi seperti sekarang ini strategi pemasaran yang efektif adalah dengan memanfaatkan media digital jika usaha yang dijalankannya ingin bertahan.

Di tengah masa darurat pandemi COVID-19 persoalan yang harus dihadapi bukan hanya bagaimana caranya untuk mengatasi pemutusan penyebaran virus, tetapi juga persoalan kemerosotan perekonomian yang kian menurun dan semakin memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya kebijakan PSBB menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Terlebih belum meredanya jumlah peningkatan penyebaran virus, menyebabkan gaya konsumsi masyarakat berubah ke sistem *online*. Sementara imbasnya bagi kelompok pedagang kecil seperti pedagang kaki lima, metode tersebut semakin membuat mereka terpinggirkan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan kelompok pedagang kaki lima untuk mempertahankan usaha mereka agar mereka tetap bisa bertahan hidup dengan mengandalkan apa yang bisa mereka pertahankan di situasi saat ini.

KAJIAN PUSTAKA

Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha perdagangan dalam sektor informal. Menurut Damsar (2002:51) Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan, dan lain sebagainya. Pedagang tersebut menggunakan perlengkapan yang mudah dipindahkan dalam menjalankan usahanya. Orang yang menjalankan usaha ini merupakan mereka yang dengan modal relatif

sedikit bergerak di bidang produksi dan penjualan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

Usaha tersebut dilakukan di tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Istilah pedagang kaki lima disebut demikian karena jumlah kaki pedagang ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga 'kaki' gerobak. Pedagang Kaki Lima menjadi sumber penghasilan bagi mereka yang berpendidikan rendah serta keterampilan yang terbatas.

Namun dimasa pandemi Covid-19 ini para pedagang memiliki hambatan dalam usaha mereka. Apalagi dalam masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana segala bentuk kegiatan dalam berbagai bidang dibatasi. PSBB merupakan peraturan yang diterbitkan Kememntrian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar bisa dilaksanakan di berbagai daerah dan segera terselesaikan. Aturan ini tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pembatasan tersebut dilakukan dalam segala bidang, seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan lain sebagainya untuk mengurangi terjaidnya kerumunan.

Untuk tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 para pedagang harus memiliki strategi. Strategi merupakan pelaksanaan yang implementasinya didasari atas kemampuan memahami situasi, perasaan, dan pengalaman. Langkah-langkah strategi selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada, serta disusun secara bertahap dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Strategi dilakukan guna mempertahankan keberlanjutan usahanya agar tetap berjalan dalam segala kondisi.

Keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi disaat mereka yang memiliki usaha mampu mencukupi dana untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kata "berkelanjutan" memiliki arti suatu proses atau tindakan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, serta proses yang berlangsung atau berjalan. Berdasarkan definisi tersebut dalam konteks bisnis yang berkelanjutan dapat dikatakan melibatkan proses pemeliharaan dan tindakan dari waktu ke waktu. Keberlanjutan usaha mengacu pada pelaku usaha yang dapat mencapai tujuan dan menambah nilai dalam usahanya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara secara mendalam dan

observasi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua orang informan yang merupakan pedagang kaki lima di daerah desa Simpang Propau, kabupaten Lampung Utara.

Instrumen pengumpul data digunakan sebagai penjaring data dalam penelitian ini. penjaring data terdiri dari daftar pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan usaha sebelum pandemi, pengaruh pandemi terhadap pendapatan, dan strategi yang digunakan pedagang kaki lima untuk bertahan di masa pandemi. Perekaman dilakukan untuk mendapatkan data wawancara.

Kajian penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi penjualan pedagang kaki lima di masa pandemi dan pengaruh pandemi terhadap pendapatan mereka.

Penelitian studi kasus dilakukan pada bulan Juli 2021. Peneliti mengumpulkan data di lapangan dengan cara pengamatan, wawancara, perekaman, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pemilihan data dan menguraikan jawaban yang diperlukan dari hasil reduksi data hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 yang sudah mewabah di Indonesia, khususnya di provinsi Lampung sendiri sudah berlangsung selama satu tahun lebih. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah mencanangkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran virus. Adanya PSBB mengharuskan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak bisa dipukul rata terhadap semua kalangan, khususnya bagi para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima hidup dari penghasilan harian yang mana apabila mereka dibatasi pergerakannya mereka akan kekurangan mendapatkan penghasilan. Terlebih apabila kebijakan PSBB belum bisa memberikan pengaruh terhadap menurunnya jumlah kasus penularan COVID-19 maka akan terus diperpanjang.

PSBB menyebabkan berkurangnya aktivitas pergerakan masyarakat. Sehingga bagi pedagang kaki lima sendiri hal itu berdampak terhadap berkurangnya konsumen yang datang. Belum lagi selama masa PSBB ini gaya konsumsi masyarakat berubah ke sistem *online* yang mana hal ini semakin membuat para pedagang kaki lima kalah bersaing. Di desa Simpang Propau contohnya, pedagang kaki lima di daerah tersebut turut mengalami dampak serupa sesuai dengan napa yang dijelaskan sebelumnya. Terutama bagi pedagang gorengan yang berjualan dipinggir jalan, dagangan mereka sepi pembeli, sebab biasanya para pembeli bukan

hanya datang dari masyarakat yang tinggal di sekitar sana, tetapi juga para penglaju yang melintasi daerah tersebut terkadang mampir untuk datang dan membeli.

Akibatnya hal tersebut berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan harian yang diperoleh. Jika biasanya dagangan ramai bisa memperoleh hingga tujuh ratus ribu rupiah, atau apabila sepi juga tidak sampai di bawah lima ratus ribu rupiah. Dalam mengatasi defisit pendapatan tersebut, pedagang gorengan ini melakukan penghematan dengan mengurangi belanja bahan-bahan. Strategi melakukan penghematan dengan cara seperti itu dirasa merupakan yang paling tepat dilakukan di tengah kondisi saat ini. Selain berhemat pedagang juga bisa melakukan pekerjaan ganda seperti membuka usaha sampingan lain, tetapi bagi pedagang gorengan hal tersebut belum bisa dilakukan karena terhalang modal, sehingga baginya mempertahankan usaha yang telah berjalan merupakan langkah tepat untuk tetap bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lain halnya dengan satu pedagang kaki lima lainnya, yakni pedagang nasi uduk. Ia juga merasakan jumlah pembeli yang datang berkurang. Karena pembeli yang datang tidak banyak, maka ia mengatur strategi dengan mengurangi jumlah dagangan yang dijual agar tidak bersisa. Sama seperti pedagang gorengan tadi, pedagang nasi uduk ini juga tidak berniat untuk membuka usaha sampingan dengan alasan yang sama. Selain itu dalam mengatasi sepi pembeli karena gaya konsumsi pembeli saat ini beralih ke sistem online, mereka tidak melakukan kerjasama dengan bermitra pada gojek atau grab, sebab di sana belum ada gojek atau grab. Mereka juga tidak melakukan perubahan pemasaran melalui media sosial lainnya seperti media WhatsApp untuk menerima pesanan selama PSBB berlangsung. Pemerintah sendiri dalam memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima telah menyediakan bantuan UMKM sebesar 2,4 juta untuk sekali transfer bagi yang mendaftar. Namun bagi pedagang gorengan sendiri ia tidak mengetahui adanya hal tersebut, sedangkan bagi pedagang nasi uduk ia mengetahui adanya bantuan tersebut tetapi tidak berniat mendaftar karena merasa terlalu ribet untuk mengurus data-data yang dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut maka akibat pandemi ini sektor perekonomian tingkat bawah yang paling merasakan dampak dari pandemi ini, terutama pedagang kaki lima. Banyak pedagang kaki lima yang perlu mengubah strategi mereka dalam berjualan supaya dapat terus bertahan di masa pandemi. Turunnya omset penjualan mengakibatkan penurunan jumlah produksi karena anggaran untuk belanja pun juga dikurangi. Omset penjualan menjadi menurun dan mengurangi pendapatan perhari. Sementara jika pandemi ini belum berakhir mereka juga belum memikirkan *planning* ke depannya apakah memang seharusnya mereka

melakukan usaha ganda dengan membuka usaha sampingan lain. Akan tetapi di sisi lain kekurangan modal menjadi kendala utama mereka ketika akan memikirkan melakukan hal tersebut, sehingga mereka cukup mempertahankan apa yang telah mereka jalani selama ini sambil berharap pandemi akan segera berakhir agar kondisi mereka tidak semakin terbelakang.

SIMPULAN

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama adanya kebijakan PSBB yang menyebabkan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat kalangan menengah. Bagi pelaku usaha sektor informal yakni pedagang kaki lima, berkurangnya pembeli menyebabkan mereka harus mengurangi jumlah produksi yang berakibat adanya penurunan pemasukan harian. Cara tersebut efektif dilakukan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal usaha. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori hukum ekonomi yang menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah produksi, maka keuntungan yang didapatkan akan semakin sedikit pula.

Strategi pengurangan jumlah produksi bermanfaat untuk mempertahankan usaha mereka karena sedikitnya omset penjualan dan menipisnya keuntungan yang didapatkan. Selain itu mereka juga kalah bersaing dengan pedagang lain yang telah beralih ke sistem *online* karena mengikuti perkembangan gaya konsumsi masyarakat saat ini. Terlebih ternyata bantuan UMKM dari pemerintah masih belum diketahui oleh beberapa orang pedagang. Serta alasan lain mereka tidak mengikuti program tersebut karena sulitnya mengurus data-data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Helen. (2020). *Effectiveness of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) toward the New Normal Era during COVID-19 Outbreak: a Mini Policy Review*. Journal Of Indonesian Health Policy And Administration vol 5, No. 2, 61-65. diakses dari: <https://scholar.google.com>
- Atuti, Puji dan Imam Qalyub (2021). *Strategi Mempertahankan Keberlanjutan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Palangka Raya*. Jurnal Daun Lontar Vol 7, No.1, 254-291. diakses dari: <https://scholar.google.com>
- Setkab. (2020). *Gov't Increases Pre-Employment Card Funds to Rp20 Trillion Amid Covid-19 Outbreak*. diakses dari: <https://setkab.go.id/en/govt-increases-pre-employment-card-funds-to-rp20-trillion-amid-covid-19-outbreak/>

Zulhijahyanti, Hanna; dkk. (2021). Strategi Mempertahankan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Masa Pandemi Covid19. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Vol 8, No. 1, 21-29. diakses dari: <https://scholar.google.com>